

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Diplomasi budaya Jepang dalam mengkonstruksi citra Geisha di masyarakat internasional pada periode 2023-2025 dapat dijelaskan melalui tiga bentuk diplomasi budaya, yaitu melalui media elektronik dan audiovisual, pariwisata, serta kesenian, yang masing-masing dioperasikan oleh aktor yang berbeda namun bergerak dalam periode yang bersamaan. Ketiga bentuk ini dianalisis menggunakan tiga kerangka diplomasi budaya dari Warsito dan Kartikasari (2007) serta Cummings (2003), yaitu pelaku (aktor), instrumen dan sarana, serta tujuan, yang secara bersama-sama menunjukkan bagaimana upaya konstruksi citra tersebut berlangsung di lapangan. Pada kerangka pelaku, upaya ini dijalankan oleh tiga kategori aktor yang bergerak secara mandiri di luar pemerintah pusat, yaitu pelaku industri budaya privat, pemerintah sub-nasional, serta komunitas seni dan budaya, yang masing-masing memanfaatkan kapasitas dan kedekatan kulturalnya terhadap tradisi Geisha. Tidak ada satupun dari keempat aktor ini bertindak atas mandat eksplisit dari pemerintah pusat, namun kehadiran yang bersamaan ketiga kategori pelaku ini menunjukkan bahwa diplomasi budaya dapat berlangsung secara sah melalui berbagai tingkatan aktor, yang sejalan dengan kerangka Warsito dan Kartikasari (2007) yang mengakui pemerintah maupun non-pemerintah sebagai pelaku diplomasi budaya yang sah.

Dari segi pelaku (aktor), penelitian ini mengidentifikasi tiga kategori aktor di luar pemerintah pusat yang terlibat dalam upaya konstruksi citra Geisha pada periode 2023-2025, yaitu pelaku industri budaya privat, pemerintah sub-nasional, dan komunitas seni dan budaya. Ketiga kategori ini secara empiris direpresentasikan oleh empat aktor yang masing-masing menjalankan peran yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu Hirokazu Kore-eda dan Bun-buku menjalankan peran sebagai produsen konten audiovisual yang menjangkau audiens global melalui *The Makanai*, Pemerintah Kota Kyoto yang menjalankan peran protektif melalui regulasi yang melindungi komunitas Geisha dari dampak *overtourism*, Pemerintah Kota Kanazawa menjalankan peran promotif melalui

Cindy Nydia Pulino, 2026

DIPLOMASI BUDAYA JEPANG DALAM MENGONSTRUKSI CITRA GEISHA DI MASYARAKAT INTERNASIONAL PERIODE 2023-2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
www.upnvj.ac.id – www.library.upvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

program pengalaman budaya yang membuka akses wisatawan internasional secara terkontrol, dan komunitas Geiko dan Maiko Gion Kobu menjalankan peran ganda sebagai objek representasi sekaligus pelaku yang merepresentasikan tradisinya sendiri melalui pertunjukan Miyako Odori. Tidak ada satupun dari keempat aktor ini bertindak atas mandat eksplisit dari pemerintah pusat, namun kehadiran yang bersamaan ketiga kategori pelaku (aktor) ini menunjukkan bahwa diplomasi budaya dapat berlangsung secara sah melalui berbagai tingkatan aktor, yang sejalan dengan kerangka Warsito dan Kartikasari (2007) mengakui pemerintah maupun non-pemerintah sebagai pelaku diplomasi budaya yang legitimasi.

Dari segi instrumen dan sarana, penelitian ini mengidentifikasi tiga kategori yang dioperasikan oleh keempat pelaku (aktor) tersebut, yaitu instrumen audiovisual yang dioperasikan oleh Kore-eda dan Bun-buku melalui platform Netflix, instrumen pariwisata yang dioperasikan oleh Pemerintah Kota Kyoto melalui regulasi dan Pemerintah Kota Kanazawa melalui program pengalaman budaya, serta instrumen kesenian yang dioperasikan oleh komunitas Gion Kobu melalui Miyako Odori. Ketiga kategori instrumen ini saling melengkapi dalam menjangkau segmen audiens yang berbeda-beda, mulai dari audiens yang mengakses budaya Geisha melalui layar tanpa kehadiran fisik di Jepang, hingga audiens yang berinteraksi langsung dengan komunitas Geisha di lokasi asalnya, sehingga secara kolektif membentuk cakupan jangkauan yang lebih komprehensif dibandingkan apabila hanya bersandar pada satu instrumen tunggal. Sementara itu, analisis terhadap kerangka tujuan menunjukkan bahwa meskipun keempat aktor bergerak dari motivasi yang berbeda-beda, mulai dari kepedulian artistik, kebutuhan perlindungan komunitas, visi pelestarian budaya, hingga komunitas tradisi, keempat aktor tersebut secara konsisten menghasilkan output yang searah, yaitu upaya memperkenalkan dan merepresentasikan citra Geisha yang lebih autentik kepada audiens internasional sebagai koreksi atas distorsi representasi Hollywood.

Ketika diinterpretasikan dalam kerangka diplomasi budaya dan *soft power* sebagai perspektif Hubungan Internasional utama, ketiga kerangka di atas mengungkap bahwa upaya konstruksi citra Geisha tidak dijalankan melalui satu

Cindy Nydia Pulino, 2026

DIPLOMASI BUDAYA JEPANG DALAM MENGONSTRUKSI CITRA GEISHA DI MASYARAKAT INTERNASIONAL PERIODE 2023-2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

program terpusat yang dirancang oleh pemerintah pusat Jepang, melainkan melalui rangkaian upaya yang dijalankan secara mandiri dan organik oleh berbagai aktor di luar orkestrasi pemerintah pusat. Ketiadaan program spesifik dari Ministry of Foreign Affairs Japan (MOFA) terkait citra Geisha, sebagaimana dipaparkan pada sub-bab 4.1.4, justru membuka ruang bagi aktor-aktor lain untuk menjalankan peran tersebut berdasarkan kapasitas dan kedekatan kultural masing-masing terhadap tradisi Geisha. Penelitian ini menemukan bahwa posisi pemerintah pusat Jepang dalam konstruksi citra Geisha bukan sebagai orkestrator yang merancang narasi dari atas, melainkan sebagai penyedia *enabling environment*, sebagaimana tercermin dari Strategi Industri Hiburan dan Kreatif yang dikeluarkan METI pada Juni 2025. Ruang yang ditinggalkan oleh ketiadaan program spesifik dari pemerintah pusat inilah yang kemudian diisi secara organik oleh berbagai aktor di luar pemerintah pusat, sebuah kondisi yang dalam kerangka *soft power* Nye (2004) justru menghasilkan daya tarik yang lebih kredibel dibandingkan apabila dikelola secara terpusat, karena tidak terasa sebagai propaganda yang dirancang secara sengaja oleh negara. Temuan ini mengorvmirasi relevansi argumen Xia (2024) bahwa daya tarik budaya tradisional merupakan komponen yang menonjol dari *soft power* Jepang, sekaligus memperluas pemahaman tentang bagaimana *soft power* tersebut dioperasionalisasikan secara konkret melalui multi-aktor yang bergerak mandiri tanpa koordinasi formal dari pemerintah pusat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa output yang dihasilkan oleh keempat aktor bersifat komunikasi budaya satu arah, yaitu memperkenalkan dan merepresentasikan citra Geisha kepada audiens internasional, dan bukan pertukaran budaya dua arah yang setara sebagaimana diimplikasikan oleh konsep “exchange” dalam definisi Cummings (2003). Temuan ini sejalan dengan kritik Iwabuchi (2015) terhadap karakter satu arah dari diplomasi budaya populer Jepang, dan memperluas relevansi kritik tersebut ke aktor-aktor di luar pemerintah pusat yang diteliti dalam penelitian ini. Sejalan dengan batasan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini berfokus pada mekanisme dan dinamika diplomasi budaya yang dijalankan oleh berbagai aktor, bukan pada studi resepsi empiris terhadap audiens internasional, sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa keempat aktor

Cindy Nydia Pulino, 2026

DIPLOMASI BUDAYA JEPANG DALAM MENGONSTRUKSI CITRA GEISHA DI MASYARAKAT INTERNASIONAL PERIODE 2023-2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
www.upnvj.ac.id – www.library.upvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

secara konsisten menjalankan upaya untuk memperkenalkan dan merepresentasikan citra Geisha yang lebih autentik, tanpa dapat disimpulkan bahwa upaya tersebut telah menciptakan saling pengertian dua arah yang setara antara Jepang dan masyarakat internasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada kajian Hubungan Internasional dengan menunjukkan bahwa diplomasi budaya dapat berlangsung melalui kesamaan arah gerak yang mandiri dan organik berbagai aktor di luar pemerintah pusat, tanpa memerlukan koordinasi formal dari satu titik kendali. Ketiadaan mandat eksplisit dari pemerintah pusat dalam kasus konstruksi citra Geisha pada periode 2023-2025 bukan merupakan kelemahan struktural, melainkan justru menjadi sumber autentisitas dan kredibilitas yang memperkuat daya tarik *soft power* Jepang di mata masyarakat internasional.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Bagi pemerintah pusat Jepang, khususnya MOFA, penelitian ini menyarankan agar posisi sebagai penyedia *enabling environment* yang telah terbentuk secara organik tetap dipertahankan, namun dapat dipertimbangkan untuk menyediakan platform koordinasi informasi antar aktor sub-nasional dan komunitas yang telah aktif menjalankan diplomasi budaya, sehingga informasi dan praktik baik seperti yang dijalankan Pemerintah Kota Kyoto dan Pemerintah Kota Kanazawa dapat saling dipelajari tanpa harus menghilangkan karakter organik dan mandiri yang menjadi sumber kredibilitas mereka di mata audiens internasional.

Bagi pemerintah sub-nasional lain di Jepang yang memiliki aset budaya tradisional serupa, penelitian ini menyarankan agar pendekatan protektif seperti yang dilakukan oleh Kyoto dan pendekatan promotif seperti yang dijalankan Kanazawa dapat dipertimbangkan sebagai dua strategi yang saling melengkapi, bukan sebagai dua pilihan yang saling eksklusif, karena keduanya efektif dalam menjangkau segmen kebutuhan yang berbeda, yaitu melindungi komunitas dari eksploitasi di satu sisi dan membuka akses pemahaman kultural yang autentik dari sisi lain.

Cindy Nydia Pulino, 2026

DIPLOMASI BUDAYA JEPANG DALAM MENGONSTRUKSI CITRA GEISHA DI MASYARAKAT INTERNASIONAL PERIODE 2023-2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

Bagi pelaku industri kreatif yang berencana memproduksi konten bertema budaya tradisional Jepang, penelitian ini menyarankan agar proses riset lapangan yang mendalam dan kolaborasi langsung dengan komunitas yang direpresentasikan, sebagaimana dilakukan Kore-eda dalam produksi *The Makanai*, dijadikan standar praktik, karena dengan kedalaman riset tersebut yang menjadi pembeda utama antara representasi yang berpotensi melanggengkan distorsi sebagaimana terjadi pada kasus *Memoirs of a Geisha*.

Bagi wisatawan internasional yang berencana mengunjungi distrik Geiko dan Maiko di Jepang, penelitian ini menyarankan agar lebih memahami konteks regulasi dan etika berkunjung yang berlaku, seperti larangan fotografi dan penutupan gang privat distrik Gion, sebagai bagian dari penghormatan terhadap komunitas Geisha yang telah lama menghadapi tekanan akibat fenomena *Geisha Hunting*, sehingga interaksi yang terjadi dapat berlangsung dalam kerangka saling menghormati alih-alih konsumsi eksotisme yang dipicu oleh misrepresentasi media.

5.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini memiliki batasan untuk tidak membahas studi resepsi empiris terhadap audiens internasional, sehingga temuan yang dihasilkan terbatas pada mekanisme dan dinamika diplomasi budaya dari sisi pelaku (aktor), bukan pada dampaknya terhadap persepsi audiens secara nyata. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi resepsi yang mengukur secara langsung bagaimana masyarakat internasional menerima dan memaknai ketiga instrumen diplomasi budaya yang teridentifikasi dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui sejauh mana komunikasi satu arah yang ditemukan dalam penelitian ini benar-benar berkontribusi pada perubahan persepsi audiens, atau justru tetap terbatas pada eksposur tanpa pemahaman yang mendalam sebagaimana dikhawatirkan oleh Cummings (2003).

Penelitian ini juga menemukan bahwa diplomasi budaya dapat berlangsung secara organik tanpa orkestrasi formal dari pemerintah pusat, sebuah temuan yang membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk

menguji apakah pola serupa juga berlaku pada aset budaya tradisional Jepang lainnya, sehingga dapat diketahui apakah ketiadaan orkestrasi pusat merupakan karakteristik unik pada kasus Geisha atau pola yang lebih luas dalam diplomasi budaya Jepang kontemporer. Selain itu, penelitian dengan desain komparatif antara Jepang dan negara lain yang memiliki program diplomasi budaya terpusat untuk aset budaya tradisional yang serupa juga disarankan, untuk memperkaya pemahaman tentang sejauh mana pendekatan organik seperti pada kasus Geisha lebih efektif dibandingkan pendekatan yang dikoordinasikan secara formal oleh pemerintah pusat.

Terakhir, penelitian ini menemukan bahwa output yang dihasilkan keempat pelaku (aktor) cenderung bersifat komunikasi satu arah, sehingga disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan pengembangan kerangka analisis yang secara eksplisit membedakan antara diplomasi budaya yang bersifat representasional atau satu arah dengan yang bersifat timbal balik atau dua arah sebagaimana diidealkan oleh konsep “exchange” dalam definisi Cummings (2003), karena kerangka yang ada saat ini belum secara tegas mengakomodasi perbedaan tersebut.